

## **Tugas Pendidikan Pancasila**

**Dosen Pengampu : Drs. Titof Tulaka, MAP**



**Disusun Oleh :**

**Asrina Popondo [ 23208067]**

**Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi**

**Fakultas Teknik**

**Universitas Negeri Manado**

**2024**

## **Tugas 4.**

### **1. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI**

- Mengapa gelombang gerakan Reformasi melanda Indonesia dalam wacana politik yang mengalami keruntuhan dalam praktek elit politik yang di hinggapi penyakit KKN?

Gelombang gerakan Reformasi melanda Indonesia karena masyarakat merasa kecewa dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di kalangan elit politik. Praktek tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan keinginan untuk perubahan dalam sistem politik. Reformasi menjadi sebuah wacana politik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi. Meskipun demikian, dalam prakteknya, elit politik masih terjerat dalam pola perilaku yang koruptif, sehingga mengecewakan harapan reformasi masyarakat.

Rangkuman :

ini mencerminkan perjuangan antara idealisme reformasi dan realitas politik yang kompleks di Indonesia

### **2. GERAKAN REFORMASI**

- di dalam gerakan reformasi pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai dasar etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik mengapa?

Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan mengapa gerakan reformasi Pancasila seringkali dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik:

1.Kekuasaan dan Kepentingan Politik : Pihak-pihak yang berkuasa atau berkepentingan politik mungkin menggunakan gerakan reformasi Pancasila untuk memperkuat atau mempertahankan posisi mereka. Mereka dapat menggunakan narasi Pancasila untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan mereka.

2.Interpretasi Subjektif: Pancasila sebagai konsep yang luas dan abstrak dapat diinterpretasikan secara subjektif oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan politik mereka. Ini memberikan ruang bagi manipulasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan politik tertentu.

3.Kurangnya Kesepahaman Bersama: Terkadang, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang makna dan implementasi Pancasila di masyarakat. Hal ini memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk menginterpretasikan Pancasila sesuai dengan kepentingan mereka tanpa perlawanan yang kuat.

4. Ketidakseimbangan Kekuasaan: Ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dapat memungkinkan pihak yang berkuasa untuk menggunakan ideologi Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan dominasi mereka atas negara dan masyarakat.

Rangkuman :

Semua faktor ini bersama-sama berkontribusi pada penggunaan gerakan reformasi Pancasila sebagai alat legitimasi politik dalam konteks politik Indonesia.

### 3. GERAKAN REFORMASI

- Mengapa reformasi disalahartikan sehingga gerakan reformasi melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya?

Reformasi sering disalahartikan karena interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak. Beberapa orang atau kelompok mungkin menggunakan label "reformasi" untuk membenarkan agenda atau perubahan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai atau tujuan sejati gerakan reformasi itu sendiri.

Rangkuman:

Penyimpangan dalam interpretasi gerakan reformasi terjadi karena beragamnya sudut pandang dan kepentingan, yang kadang-kadang menyebabkan pemakaiannya untuk menjustifikasi agenda yang bertentangan dengan nilai atau tujuan aslinya.

### 4. PANCASILA SEBAGAI DASAR CITA- CITA REFORMASI

- Mengapa dasar cita" reformasi yang terkandung dalam nilai pancasila disalahgunakan menjadi praktek nepotisme sehingga merajalela menjadi kolusi dan nepotisme?

Cita-cita reformasi yang terkandung dalam nilai Pancasila sering disalahgunakan menjadi praktek nepotisme karena adanya ambisi pribadi dan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai moral. Pemimpin yang memiliki kekuasaan seringkali menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan keluarga atau orang-orang terdekat, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan anti-korupsi yang diamanatkan oleh Pancasila. Akibatnya, praktek kolusi dan nepotisme merajalela karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif.

Rangkumannya :

Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas publik untuk mencegah praktek-praktek tersebut merusak keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. PANCASILA SEBAGAI

- Reformasi sebagai tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sebagai aturan perundang-undangan dan peristiwa reformasi hukum pada tanggal berapa? Bulan? Dan tahun? Jelaskan!

Reformasi sebagai tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sebagai aturan perundang-undangan menjadi semakin penting karena kebutuhan akan keadilan dan perubahan yang diakui oleh semua. Peristiwa reformasi hukum terjadi pada tanggal 1 Maret 2002, ketika Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani UU No. 22/2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). UU ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia dengan memperketat pengawasan terhadap perilaku koruptif di dalam pemerintahan.

Rangkumannya :

Reformasi hukum pada tahun 2002 dengan diterbitkannya UU No. 22/2002 menjadi tonggak penting dalam upaya membawa perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme.